



# **DINAMIKA HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA**



**LALU HADI ADHA, SH., MH.**

Lalu Hadi Adha, SH., MH.

.....

**DINAMIKA HUKUM  
KETENAGAKERJAAN  
INDONESIA**

.....

LALU HADI ADHA, SH., MH.



*Pustaka Bangsa  
(Anggota IKAPI)*

*Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*

iii



Judul : Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia  
Penulis : Lalu Hadi Adha, SH., MH.  
Editor : Sarkawi, SH., MH.  
Layout : Albadawi  
Design Sampul : Usman Ali  
Cetak : Tim CV. Pustaka Bangsa  
Jumlah Halaman : 504 + xvi hlm.  
Dimensi Buku : 15 cm x 23 cm

**Penerbit:**

**Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI)**  
e-mail : [pustakabangsa05@gmail.com](mailto:pustakabangsa05@gmail.com)  
website : <https://pustakabangsa.com/>

**Alamat:**

- I. Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Gerisak, Mataram-NTB  
Telp. (0370) 629946 / Mobile Phone; +6281999271122
- II. Jalan Udayana Mataram-NTB  
(Jln. Gili Gde No.12, Komplek Pertokoan Nusantara)  
Telp. (0370) 7508536 / Mobile Phone; +628111444499

Cetakan Pertama: Juli 2022

ISBN: 978-623-5301-24-2

---

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

---

## KATA PENGANTAR

---

Buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa Fakultas Hukum akan kepustakaan tentang Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan serta memberikan pengertian yang bersifat dasar mengenai ruang lingkup, prinsip-prinsip, serta penyesuaian dengan peraturan-peraturan terbaru dalam persoalan di bidang Hukum Ketenagakerjaan. Dengan demikian, buku ini merupakan bahan kajian yang dapat digunakan untuk membantu dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di ruang kuliah. Buku ini merupakan bahan untuk membantu dalam memberikan kuliah, sehingga materi buku ini disusun berdasarkan rencana kegiatan proses belajar mengajar. Dengan adanya buku ini bukan berarti mengesampingkan buku-buku teks (referensi) wajib mengenai mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang sudah beredar, melainkan ingin melengkapi dengan tujuan agar mempermudah mahasiswa yang sedang mengikuti proses pembelajaran dalam mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Buku ini tentu tidak lepas

dari kekurangan-kekurangan, sehingga penulis menganggap perlu untuk menerima masukan demi kesempurnaan buku ini.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat baik untuk proses pembelajaran maupun untuk kegiatan praktik hukum.

Penulis,

ttd

Hadi Adha



## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL -----	i
KATA PENGANTAR -----	v
DAFTAR ISI -----	vii
BAB I. KONSEP DASAR DAN TINJAUAN UMUM HUKUM KETENAGAKERJAAN -----	1
A. Pengertian Hukum Ketenaga- kerjaan -----	1
B. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan -----	8
1. Masa Pra Kemerdekaan -----	9
2. Masa Setelah Kemerdekaan -----	16
C. Asas-Asas dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan -----	25
D. Para Pihak dan Sifat-Sifat Hukum Ketenaga kerjaan -----	31
1. Subjek                                 Hukum Ketenagakerjaan -----	31
2. Objek Hukum Perburuhan -----	32
E. Sifat Hukum Ketenagakerjaan -----	35

	F. Sumber Hukum Ketenagakerjaan-----	37
	1. Undang-undang -----	39
	2. Peraturan lainnya: -----	39
	3. Kebiasaan -----	40
	4. Putusan-----	40
	5. Perjanjian -----	42
	G. Ketentuan Peraturan Per-undang-undangan Terkait Ketenagakerjaan---	48
BAB II.	PENEMPATAN TENAGA KERJA -----	65
	A. Prinsip-Prinsip Penempatan Tenaga Kerja-----	65
	B. Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Negeri -----	70
	C. Penempatan Tenaga Kerja Di Luar Negeri -----	77
	1. Subtansi Pokok Pengaturan dalam Undang-undang No 18 tahun 2017 -----	78
	2. Pengertian Pekerja Migran Indonesia -----	82
	3. Syarat Jadi Pekerja Migran-----	87
	4. Peranan, Fungsi dan Tugas BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) -----	91
BAB III.	HUBUNGAN KERJA -----	99
	A. Tinjauan Hubungan Kerja-----	99
	1. Unsur Hubungan Kerja -----	102
	2. Timbulnya Hubungan Kerja-----	103
	B. Perjanjian Kerja sebagai Dasar Hubungan Kerja -----	105
	1. Perjanjian Kerja -----	109



C.	Jenis Perjanjian Kerja dan Berakhirnya Perjanjian Kerja -----	115
D.	Perbandingan Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan -----	117
E.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Undang-Undang Cipta Kerja -----	130
BAB IV.	<i>OUTSOURCING</i> -----	135
A.	Tinjauan Tentang <i>Outsourcing</i> -----	135
B.	Istilah dan Pengertian <i>Outsourcing</i> ---	141
C.	Sejarah <i>Outsourcing</i> -----	144
D.	Pengaturan <i>Outsourcing</i> Dalam Peraturan Per-Undang-Undangan ---	147
1.	Undang-Undang No 13 Tahun 2003 -----	147
2.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 -----	152
E.	<i>Outsourcing</i> Dalam Undang-Undang Cipta Kerja -----	160
BAB V.	TENAGA KERJA ASING -----	165
A.	Tinjauan Umum dan Pengertian Tenaga Kerja Asing -----	165
B.	Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia -----	170
1.	Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan --	171
2.	Undang-undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian -----	180
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi	



	Pengendalian Lalu Lintas dan Ritribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing -----	181
4.	Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing -----	183
5.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 10 tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing -----	189
6.	Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 228 tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing -----	193
C.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing -----	195
D.	Kedudukan Hukum Tenaga Kerja Asing Di Indonesia -----	206
E.	Pengaturan Tenaga Kerja Asing dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja -----	211
1.	Pengertian dan Istilah yang Berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) -----	214
2.	Pemberi Kerja TKA meliputi: -----	217
3.	Kewajiban dan Larangam Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing -----	219
4.	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing --	221

5.	Dana Kompensasi Penggunaan TKA-----	228
6.	Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing -	230
7.	Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja Pendamping dan Tenaga Kerja Asing (TKA)-----	235
BAB VI.	PERLINDUNGAN KERJA -----	237
A.	Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan dan Anak -----	237
1.	Perlindungan Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan -----	243
2.	Pedoman Hukum Bagi Pekerja Wanita -----	244
3.	Peranan Penting Dinas tenaga Kerja -----	246
4.	Hambatan-Hambatan Hukum Bagi Pekerja Wanita -----	246
5.	Perlindungan Pekerja Perempuan Berdasarkan Konvensi ILO-----	248
B.	Perlindungan Pekerja Anak -----	249
1.	Anak yang bekerja -----	251
2.	Pekerja anak -----	251
C.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)-----	258
1.	Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja -----	261



2. Tujuan Kesehatan, Keselamatan Dan Keamanan Kerja -----	263
D. Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial -----	267
1. Pengertian Sistem Jaminan Sosial Nasional. -----	270
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) -----	276
BAB VII. PENGUPAHAN -----	283
A. Pengertian Upah -----	283
B. Macam-Macam Sistem Pengupahan -----	287
1. Sistem Upah Menurut Waktu ----	287
2. Sistem Upah Borongan -----	287
3. Sistem Co-Partnership -----	288
4. Sistem Upah Bagi Hasil -----	288
5. Sistem Upah Menurut Prestasi --	289
6. Sistem Upah Skala -----	289
7. Sistem Upah Premi -----	289
8. Sistem Bonus -----	290
9. Sistem Upah Indeks Biaya Hidup -----	290
10. Upah Lembur -----	290
11. Upah minimum -----	291
C. Tujuan Penetapan Upah Minimum ---	291
D. Kebijakan Pengupahan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja -----	292
1. Kebijakan Pengupahan -----	294

BAB VIII. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KELEMBAGAAN-----	331
A. Hubungan Industrial-----	331
1. Pengertian-----	333
2. Tujuan-----	334
3. Peran dan Fungsi Pemerintahan-----	338
4. Peran dan Fungsi Pengusaha----	340
B. Kelembagaan-----	341
1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh--	342
2. Organisasi Pengusaha-----	346
3. Lembaga Kerja Sama Bipartit----	348
4. Lembaga Kerja Sama Tripartit---	353
5. Peraturan Perusahaan-----	354
6. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)-----	359
7. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial-----	366
C. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial-----	372
BAB IX. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA-----	389
A. Pengertian Umum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)-----	389
B. Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja-----	392
1. PHK Karena Kesalahan Berat----	392
2. PHK Karena Ditahan yang Berwajib Bukan Pengaduan Pengusaha-----	395



3.	PHK Karena Sudah Mendapat Surat Peringatan -----	396
4.	PHK Karena Mengundurkan Diri -----	397
5.	PHK Karena Perubahan Status, Penggabungan, Peleburan atau Perubahan Kepemilikan-----	398
6.	PHK Karena Perusahaan Tutup -	398
7.	PHK Karena Perusahaan Pailit---	399
8.	PHK Karena Meninggal Dunia ---	399
9.	PHK karena Usia Pensiun -----	399
10.	PHK Karena Mangkir -----	401
11.	PHK Karena Kesalahan Berat Pengusaha -----	401
12.	PHK Tanpa Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial-----	403
13.	PHK Karena Sakit Berkepanjangan-----	403
C.	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya PHK -----	404
1.	Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan-----	404
2.	Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja/ Buruh -----	409
3.	Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum -----	411
4.	Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengadilan-----	414
D.	Hak-Hak Pekerja/Buruh Yang di PHK dalam UU No 13 tahun 2003 ---	416

1. Upaya Menghindarkan PHK-----	420
2. Penetapan PHK oleh Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial-----	421
3. Larangan PHK -----	421
4. PHK tanpa Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial -----	423
5. PHK Batal Demi Hukum -----	423
6. Tindakan Skorsing-----	424
7. Uang Pesangon -----	424
8. Uang Penghargaan Masa Kerja --	425
9. Uang Penggantian Hak Yang Seharusnya Diterima-----	426
10. Komponen Upah -----	426
E. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Undang-Undang Cipta Kerja -----	428
1. Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan Pengusaha Dalam UU Cipta Kerja-----	435
2. Hak-Hak Pekerja/Buruh Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dalam UU Cipta Kerja -----	442
F. Standar Perburuhan Internasional Mengatur Tentang PHK -----	445
1. Prosedur Banding Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja -----	447
2. Hak-Hak Pekerja yang di PHK ---	449
BAB X. SERIKAT PEKERJA DAN ORGANISASI PENGUSAHA -----	453



A. Tinjauan Umum Serikat Pekerja Dan Organisasi Pengusaha-----	453
B. Dinamika Serikat Pekerja -----	455
1. Pengertian Serikat Pekerja dan Serikat Buruh -----	459
C. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait Serikat Pekerja -----	463
1. Asas, Tujuan, dan Pengertian Umum Terkait Serikat Pekerja ---	465
D. Dinamika Organisasi Pengusaha ---	484
1. Asosiasi Pengusaha Indonesia. (APINDO) -----	486
2. Kamar Dagang dan Industri Indonesia. (KADIN)-----	492
DAFTAR PUSTAKA -----	499